



PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA-2022

BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang

☎ 0751-7054555, 7054374

✉ bappedaprov@sumbarprov.go.id

🌐 bappeda.sumbarprov.go.id

▶ BAPPEDA Prov Sumatera Barat

📷 [bappeda.sumbar](https://www.instagram.com/bappeda.sumbar)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah ﷻ karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah selesai disusun.

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk mengevaluasi secara keseluruhan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat serta untuk mempertanggungjawabkan sekaligus menjadi masukan dalam menyusun dan menyempurnakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Besar harapan Kami laporan yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2022, dan menjadi bahan dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Padang, 12 Januari 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Gambaran Organisasi	2
1.4.1. Struktur Organisasi	2
1.4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	5
1.4.3. Struktur Organisasi	10
1.4.4. Cascading Kinerja	12
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022	16
2.1. Tujuan dan Sasaran	16
2.1.1. Tujuan	16
2.1.2. Sasaran.....	16
2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
BAB III HASIL PELAKSANAAN.....	26
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran	26
3.2. Capaian Indikator Kinerja.....	46
BAB IV PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Rekomendasi	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
Tabel 2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2022	17
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2022 .	18
Tabel 3.1.1 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2022	30
Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	46
Tabel 3.2.2 Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda.....	4
Gambar 1.2. Cascading Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	12
Gambar 1.3 Cascading I Bappeda	13
Gambar 1.4 Cascading II Bappeda	14
Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran TA 2022 per Program	27
Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2022 per Program.....	27
Gambar 3.1.3 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2022 per Bidang	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dengan tugas pokok sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2022 Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana melalui dana APBD pada tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2022, dengan nomor DPA: DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 sebesar Rp. 20.388.412.338,-. Kemudian pada tanggal 4 November 2022 ditetapkan anggaran perubahan melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 November 2022, dengan alokasi dana untuk Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi Rp. 19.067.129.634,-. Hasil akhir yang menjadi tujuan dengan tersedianya anggaran tersebut adalah terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, maka disusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2022 ini berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2022 ini adalah untuk mengevaluasi secara keseluruhan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilaksanakan masing-masing bidang sebagai evaluasi dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian

sasaran program operasional tahunan yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang disediakan.

3. Bahan masukan dalam menyusun dan menyempurnakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2022 ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Program Kerja serta langkah-langkah strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemecahan masalah tersebut.
3. Rekomendasi tindak lanjut diperlukan sebagai acuan pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun berikutnya.

1.4. Gambaran Organisasi

1.4.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
- D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan.
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

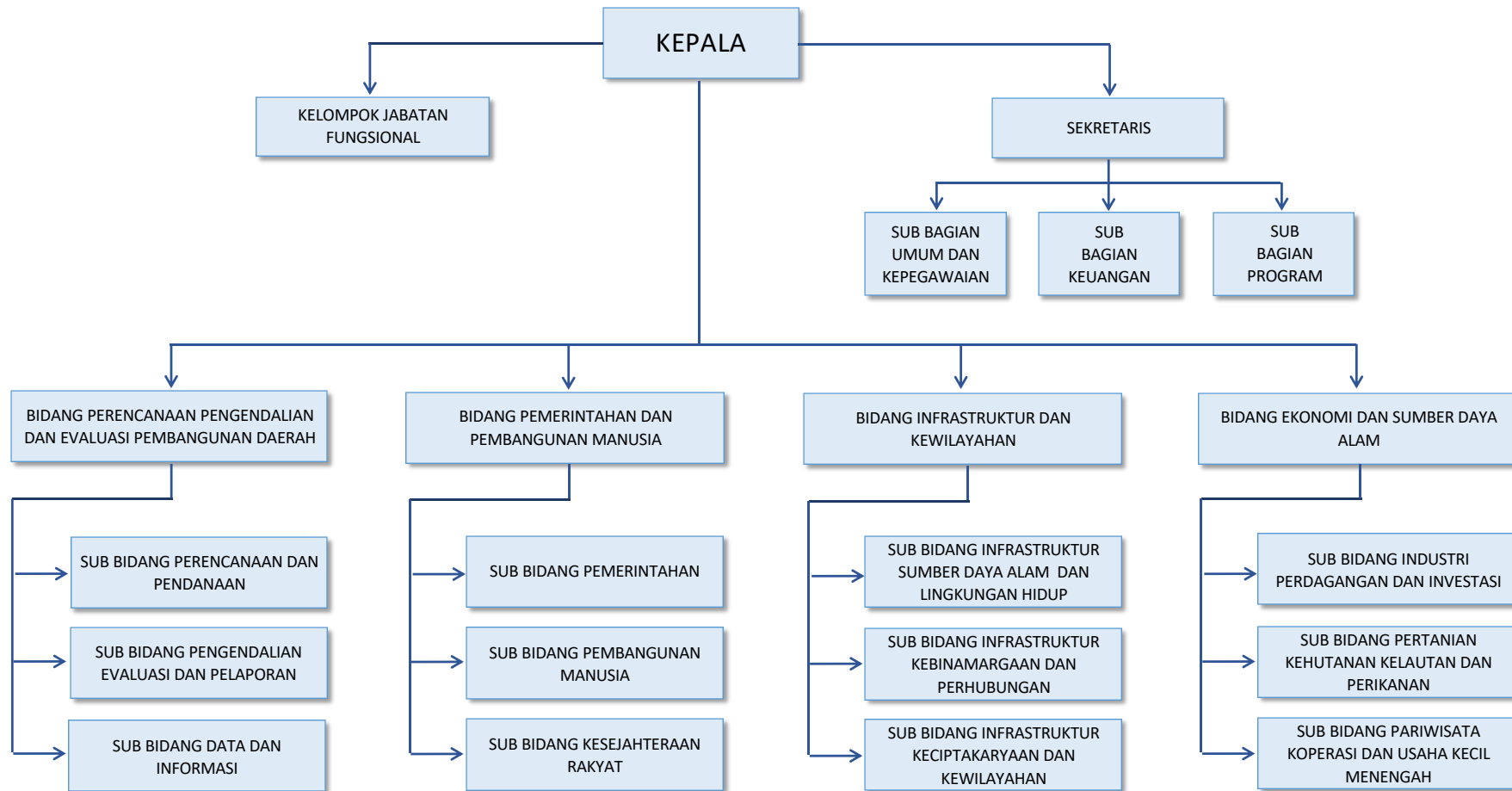
- E. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi.
 - 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
 - 3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
 - 3. Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dengan komposisi jabatan struktural yang terdiri atas :

- a. Jabatan Kepala Badan, Eselon II.a
- b. Jabatan Sekretaris dan Jabatan Kepala Bidang, Eselon III.a
- c. Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV.a
- d. Jabatan Fungsional Perencana

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, terhitung mulai januari 2022, dilaksanakan penyetaraan dua belas kepala sub bidang dan satu kepala sub bagian program menjadi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda. Dan saat ini sedang dilaksanakan pembahasan Peraturan Gubernur pengganti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda

1.4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan jangka panjang daerah 20 tahunan (RPJPD), dokumen jangka menengah daerah 5 tahunan (RPJMD) dan dokumen jangka pendek tahunan (RKPD).
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Menyelenggarakan fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota.
4. Menyelenggarakan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD) Kabupaten/Kota.
5. Menyusun Rencana Strategis dan Program Kerja Badan.
6. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan.
7. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Bappeda.
8. Mengkoordinir Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan stakeholder urusan pemerintahan Nasional, regional dan Daerah di bidang perencanaan.
10. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan.
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala Badan membawahi Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta kelompok jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan.
2. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan.
3. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan.
4. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Badan.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan.
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan.
8. Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.

4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 5. Penyelenggaraan Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD.
 6. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah
 7. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah.
 8. Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan Daerah.
 9. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
 10. penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah.
 11. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah.
 12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 3. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD.
 4. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
 5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 6. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

7. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 8. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 9. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 10. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 11. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 12. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah, dengan fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 2. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif.
 3. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 4. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 6. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

7. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 8. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 9. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 10. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 11. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 12. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, dengan fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 3. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 4. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 6. Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.

7. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 8. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 9. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 10. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 11. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 12. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dengan komposisi jabatan struktural yang terdiri atas :

- e. Jabatan Kepala Badan, Eselon II.a
- f. Jabatan Sekretaris dan Jabatan Kepala Bidang, Eselon III.a
- g. Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV.a
- h. Jabatan Fungsional Perencana

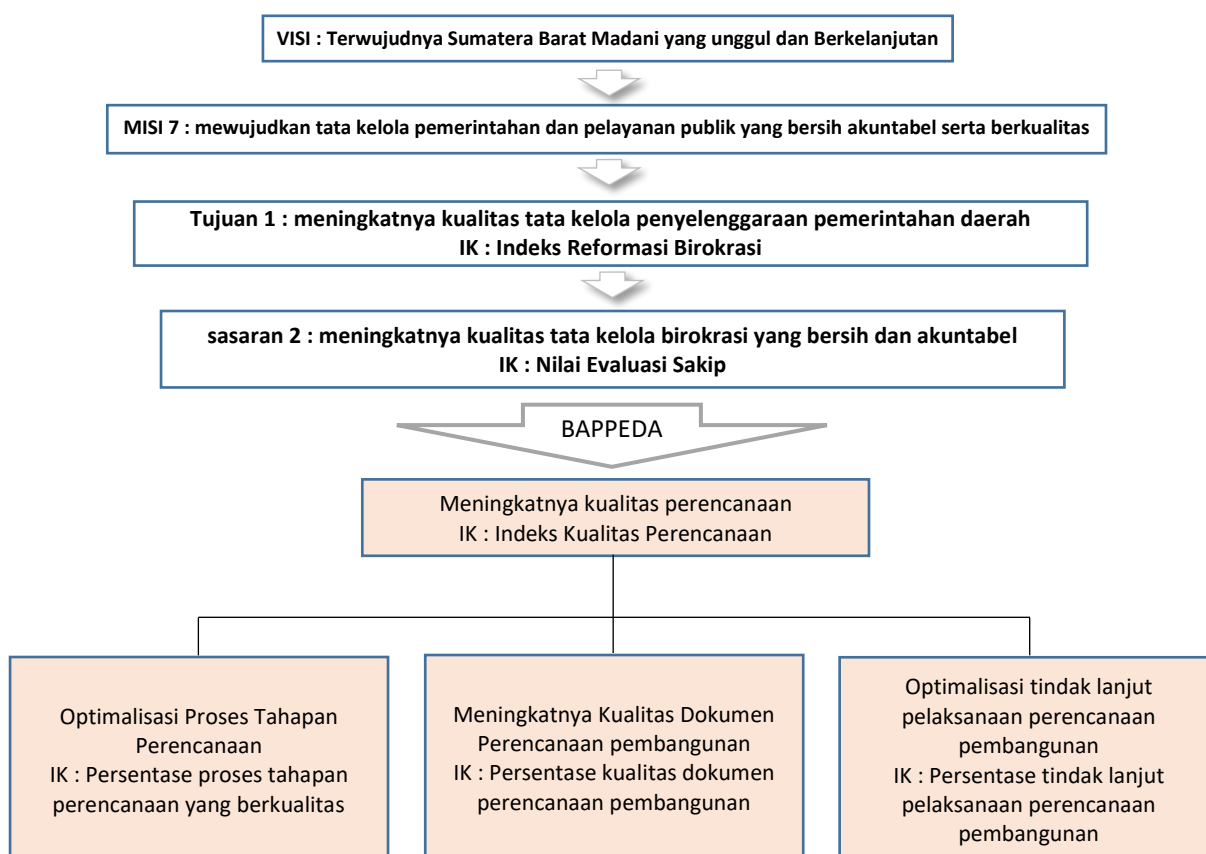
Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, terhitung mulai Januari 2022, dilaksanakan penyetaraan dua belas kepala sub bidang dan satu kepala sub bagian program menjadi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda. Dan saat ini sedang dilaksanakan pembahasan Peraturan Gubernur pengganti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

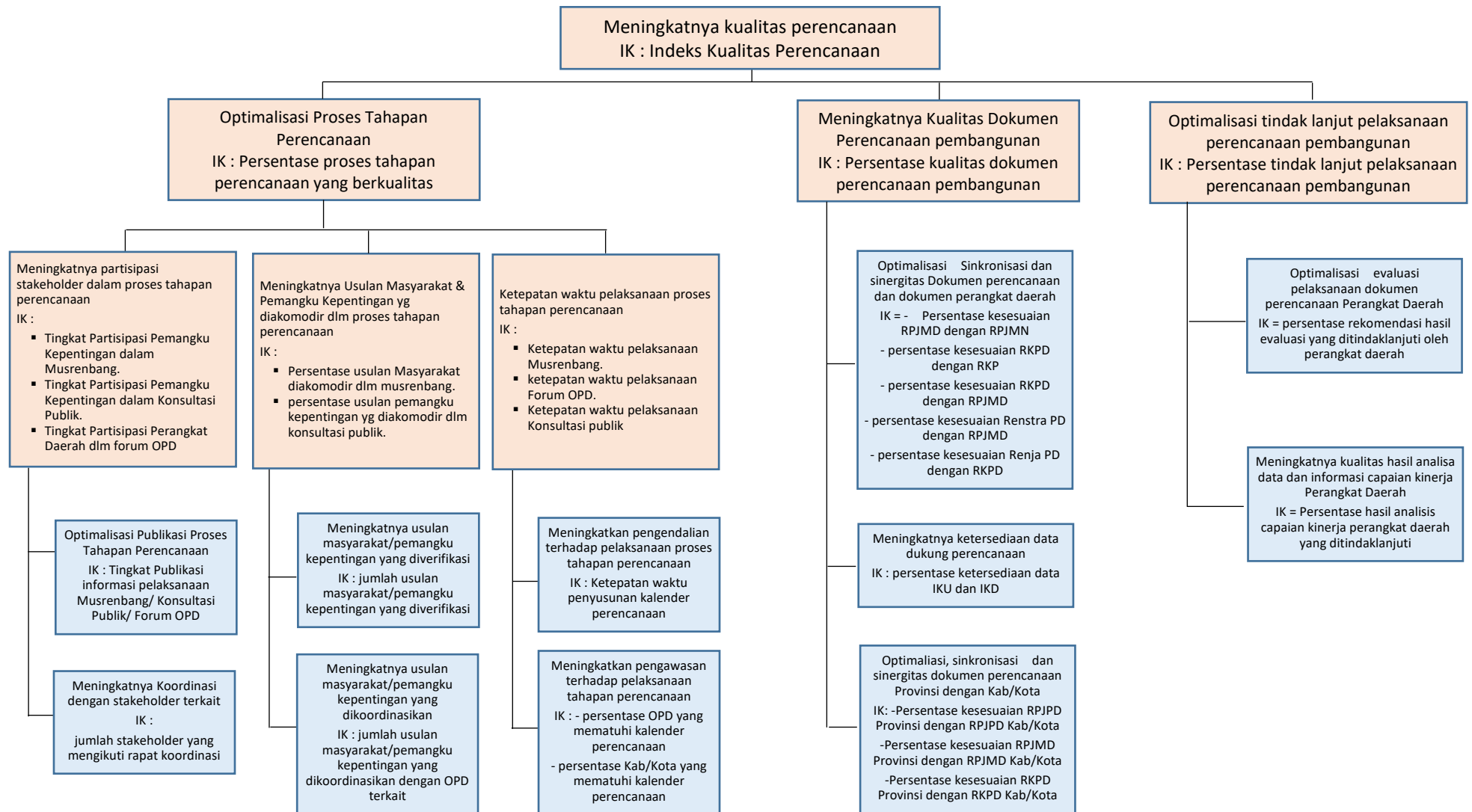
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

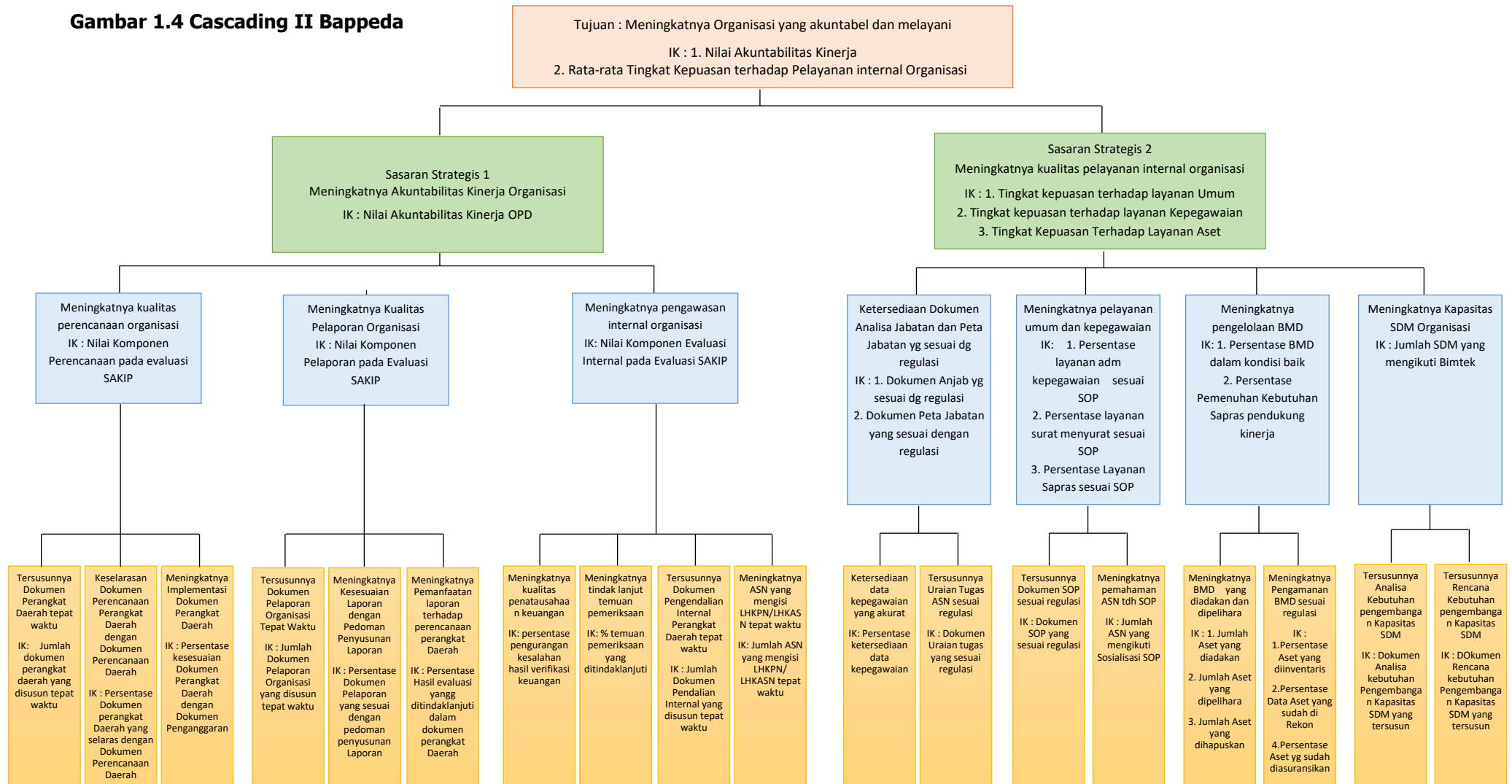
1.4.4. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut :

Gambar 1.2. Cascading Bappeda Provinsi Sumatera Barat



Gambar 1.3 Cascading I Bappeda

Gambar 1.4 Cascading II Bappeda

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2022 yang memuat dasar hukum dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta tugas pokok dan fungsinya, Maksud dan Tujuan Laporan, Ruang lingkup penyusunan laporan disertai dengan batasan-batasan penulisan laporan agar lebih terarah, Gambaran Organisasi yang menggambarkan struktur organisasi beserta fungsinya yang juga dijabarkan dalam cascading kinerja, serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022

Bagian ini menguraikan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 yang telah tertuang dalam dokumen Renja 2022 yang meliputi Tujuan dan Sasaran serta Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB III Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2022

Bagian ini menguraikan capaian indikator kinerja, realisasi penyerapan anggaran, kendala dan permasalahan dan penghargaan yang diterima pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja pembinaan yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun anggaran 2022.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

2.1. Tujuan dan Sasaran

2.1.1. Tujuan

Berdasarkan Misi ke 7 (tujuh) yang merupakan salah satu perwujudan dari visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas, dengan sasaran misi yang menjadi dasar tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan yang harus dicapai pada tahun 2022, yang tertuang dalam Renstra Bappeda 2021 – 2026, yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Melalui tujuan ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dalam arti bahwa dokumen perencanaan daerah tersebut harus konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

2.1.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Perencanaan dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi

Adapun sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25
3	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	83

Tabel 2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2022

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.181.397.607	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.836.496.583	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.049.235.444	APBD

2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Penyusunan program dan kegiatan ini tidak terlepas dari pencapaian visi misi Gubernur yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2022, Bappeda Provinsi Sumatera Barat merencanakan 3 program, yaitu (1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan (3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 14 kegiatan dan 74 sub kegiatan. Kemudian pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, 3 sub kegiatan yang telah direncanakan diawal tidak jadi dilaksanakan, serta dibutuhkan penambahan 2 sub kegiatan untuk mendukung operasional organisasi, sehingga lingkup sub kegiatan Bappeda pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 menjadi 73 Sub Kegiatan. Sub kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :

- a. Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 3. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
- b. Sub Kegiatan yang ditambahkan
 1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Adapun ruang lingkup kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Anggaran Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2022

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	80 orang

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	18 orang
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 Dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Laporan
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 laporan
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	12 unit
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 Stel
18	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Kegiatan Capacity Building	80 Orang
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	1 Kali

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3 Orang
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Jenis
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Jenis
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	21 jenis
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	82 Jenis
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 Dokumen
29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	4 Orang 3 Aplikasi
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%
30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan baru.	1 Unit
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Jenis
VII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 m ³ 100 mbps 12 Bulan 245.000 KVA 8 rekening
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	27 orang
VIII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 unit
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	1 unit
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	62 unit
IX.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen
40	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2 dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
41	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Kosultasi Publik yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
42	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
43	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen
X.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen
44	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
45	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan hasil pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	1 dokumen
46	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen
XI.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85%
47	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 Dokumen
48	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen
49	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
XII.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	2 dokumen
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 Laporan
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Rumusan
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
XIII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 Rumusan
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 Dokumen
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 Rumusan
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 laporan
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah hasil sinergitas Bidang Sumber Daya Alam.	1 laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
XIV	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan
68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan
69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan
70	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Dokumen
71	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 Rumusan
72	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 laporan
73	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

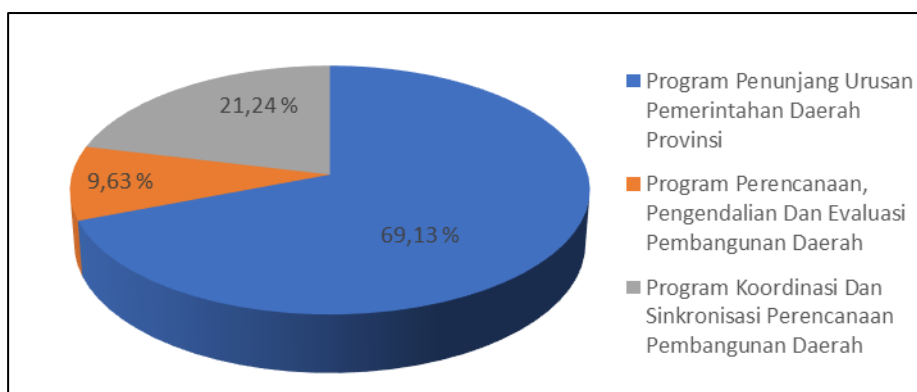
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi serapan anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.920.620.969,-, atau sebesar 99,23% dari total DPPA TA 2022. Anggaran tersebut tersebar dalam tiga program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan (3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kinerja masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :

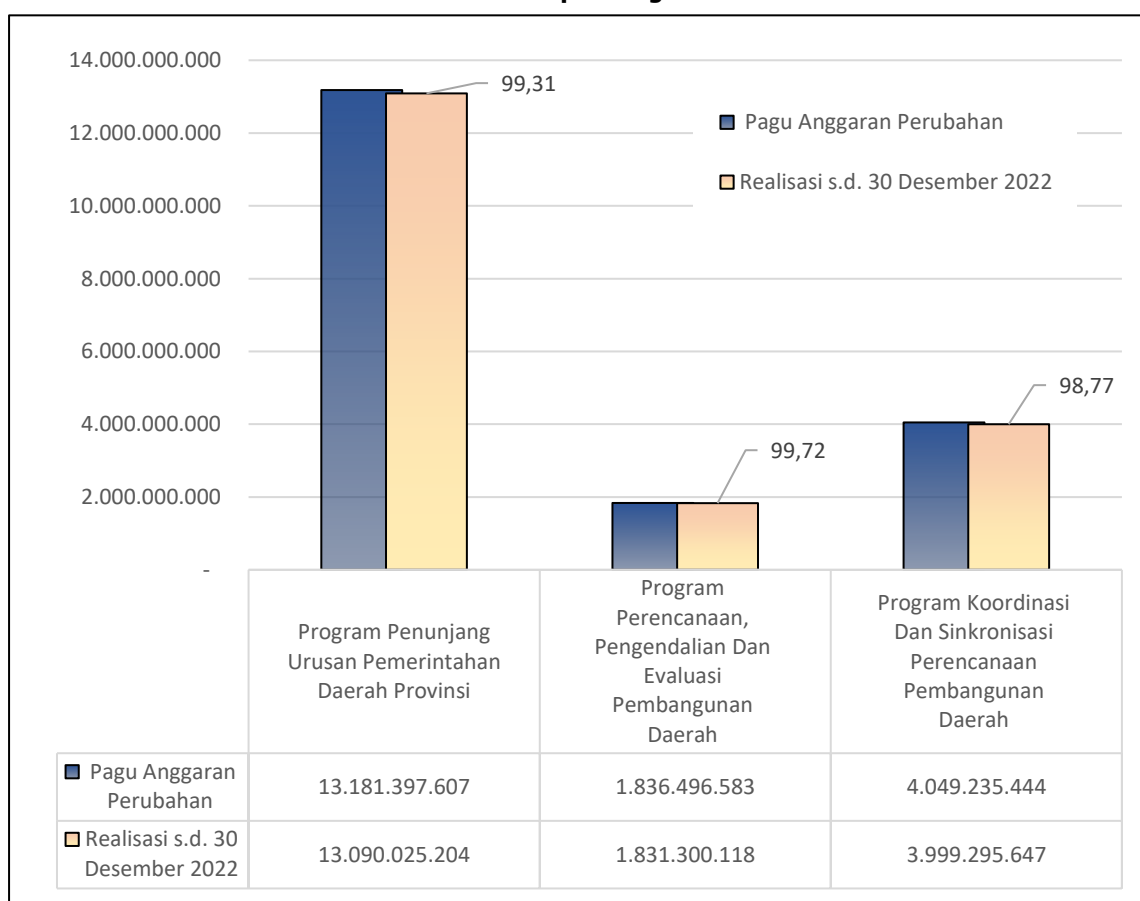
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp. 13.181.397.607,- (69,13 % dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2022), memiliki realisasi keuangan sebesar 99,31% atau sebesar Rp. 13.090.025.204,-.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.836.496.583,- (9,63% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2022), memiliki realisasi keuangan sebesar 99,72 % atau sebesar Rp. 1.831.300.118,-.
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Bidang PPM, Bidang Ekonomi & SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.049.235.444,- (21,24% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2022), memiliki realisasi keuangan sebesar 98,77 % atau sebesar Rp. 3.999.295.647,-.

Persentase Jumlah Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2022 per Program. Sementara untuk realisasi keuangan masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 3.1.2 Grafik Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022 per Program, dan untuk perbandingan realisasi keuangan pada masing-masing bidang dapat dilihat pada Gambar 3.1.3 Grafik Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022 Per Bidang.

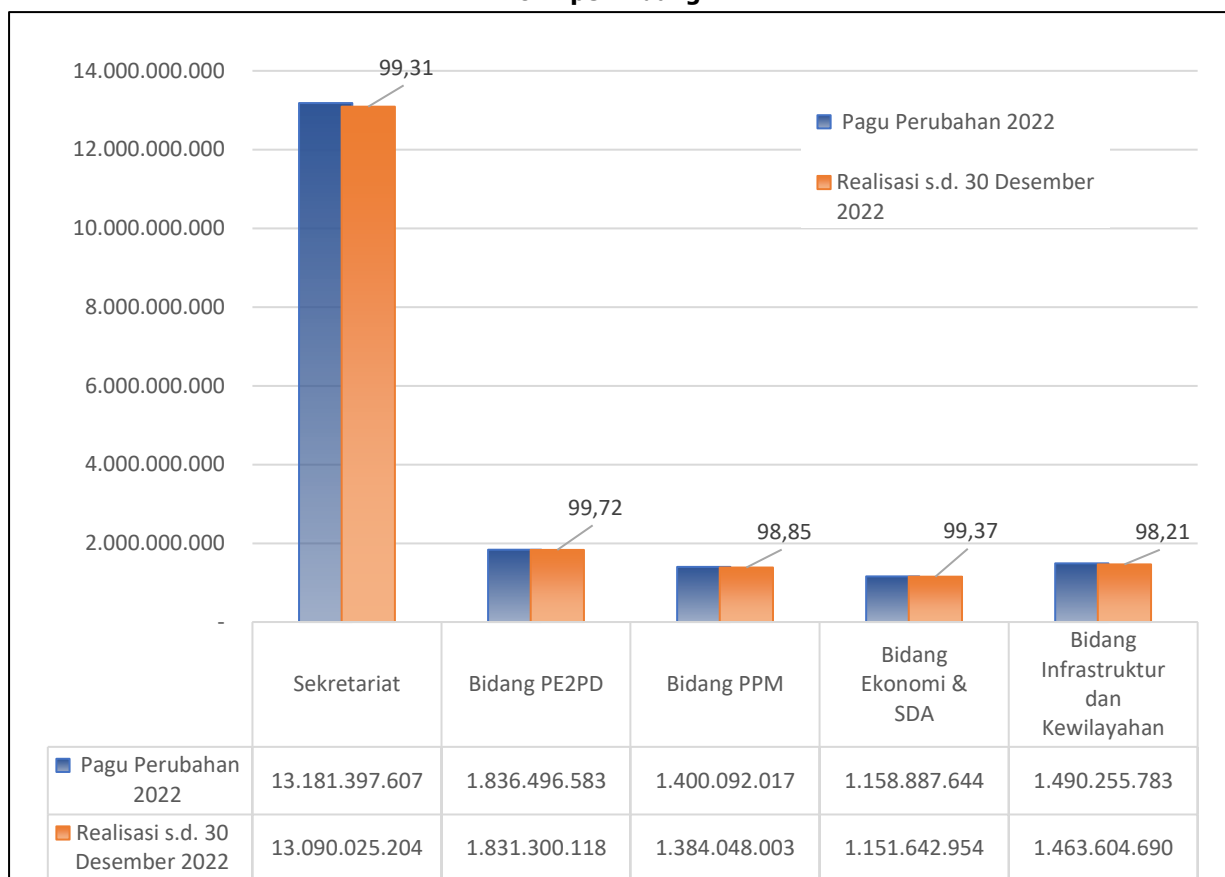
Gambar 3.1.1
Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2022 per Program



Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2022 per Program



**Gambar 3.1.3 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan
TA 2022 per Bidang**



Jika dilihat kemajuan realisasi keuangan per bidang lingkup Bappeda Provinsi Sumatra Barat, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat, dengan anggaran pada DPA Tahun 2022 sebesar Rp. 13.181.397.607,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 13.090.025.204,- atau sebesar 99,31 % dari total anggaran.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), dengan anggaran pada DPA Tahun 2022 sebesar Rp. 1.836.496.583,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 1.831.300.118,- atau sebesar 99,72 % dari total anggaran.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran pada DPA Tahun 2022 sebesar Rp. 1.400.092.017,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 1.384.048.003,- atau sebesar 98,85 % dari total anggaran.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan anggaran pada DPA Tahun 2022 sebesar Rp. 1.158.887.644,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 1.151.642.954,- atau sebesar 99,37 % dari total anggaran.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran pada DPA Tahun 2022 sebesar Rp. 1.490.255.783,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 1.463.604.690,- atau sebesar 98,21 % dari total anggaran.

Secara keseluruhan kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan harapan, dimana seluruh kegiatan dan sub kegiatan dapat diselesaikan dengan baik sesuai target indikator kinerja yang disusun dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp. 18.920.620.969,-.

Potret serapan anggaran berdasarkan masing-masing sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2022

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01	PERENCANAAN			19.067.129.634		18.920.620.969		99,23
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	13.181.397.607		13.090.025.204		99,31
5.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	206.860.540	100 %	205.023.464	100,00	99,11
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	143.577.050	2 Dokumen	142.347.150	100,00	99,14
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.771.550	1 Dokumen	7.758.400	100,00	99,83
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.280.350	1 Dokumen	7.272.500	100,00	99,89
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	4.447.150	1 dokumen	4.446.600	100,00	99,99
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	5.063.700	1 Dokumen	5.046.400	100,00	99,66

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	20.820.840	4 dokumen	20.420.014	100,00	98,07
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	17.899.900	4 Dokumen	17.732.400	100,00	99,06
5.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	8.713.224.910	100 %	8.676.773.126	100,00	99,58
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	80 orang	8.400.814.329	80 orang	8.364.627.902	100,00	99,57
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	18 orang	264.910.550	18 orang	264.910.000	100,00	100,00
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	4.834.064	129 dokumen	4.833.500	100,00	99,99
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 laporan	8.424.445	1 laporan	8.423.300	100,00	99,99
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 laporan	2.461.322	1 laporan	2.460.724	100,00	99,98

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	31.780.200	13 Laporan	31.517.700	100,00	99,17
5.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	96.890.500	100 %	96.384.454	100,00	99,48
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	12 unit	73.536.000	12 Unit	73.030.704	100,00	99,31
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen	9.724.500	3 Dokumen	9.723.750	100,00	99,99
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	13.630.000	1 dokumen	13.630.000	100,00	100,00
5.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	331.208.988	100 %	328.515.887	100,00	99,19
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 stel	65.250.000	87 stel	65.088.180	100,00	99,75
5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali	17.650.638	12 kali	17.598.455	100,00	99,70

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	80 orang	213.554.450	80 orang	211.259.500	100,00	98,93
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	1 kali	21.104.400	1 kali	21.035.352	100,00	99,67
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Bappeda yang mengikuti Bimtek	3 Orang	13.649.500	3 Orang	13.534.400	100,00	99,16
5.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	100 %	1.693.975.352	100 %	1.682.404.808	100,00	99,32
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Jenis	14.994.000	12 Jenis	14.994.000	100,00	100,00
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	168.795.800	8 jenis	168.054.940	100,00	99,56
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	21 jenis	304.160.930	21 jenis	298.901.500	100,00	98,27
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	82 Jenis	256.378.122	82 Jenis	255.879.900	100,00	99,81
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	22.991.500	7 jenis	22.991.425	100,00	100,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	10.500.000	6 Jenis	10.440.000	100,00	99,43
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 Dokumen	656.155.000	4 Dokumen	651.143.043	100,00	99,24
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	▪ Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. ▪ Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 Orang 3 Aplikasi	260.000.000	4 Orang 4 Aplikasi	260.000.000	100,00	100,00
5.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	131.906.980	100 %	131.904.625	100,00	100,00
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	1 Unit	33.164.625	1 Unit	33.164.625	100,00	100,00
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	98.742.355	3 Jenis	98.740.000	100,00	100,00
5.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.319.298.809	100 %	1.283.707.936	100,00	97,30
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 surat	7.500.000	1.036 surat	7.500.000	100,00	100,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	▪ Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. ▪ Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. ▪ Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan ▪ Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan ▪ Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 m ³ 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 rekening	270.970.500	700 m ³ 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 rekening	254.594.337	100,00	93,96
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	27 orang	1.040.828.309	27 orang	1.021.613.599	100,00	98,15
5.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	688.031.528	100 %	685.310.904	100,00	99,60
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	40.863.155	1 Unit	40.672.873	100,00	99,53

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	210.681.673	10 Unit	210.424.641	100,00	99,88
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 unit	32.610.000	39 unit	32.071.400	100,00	98,35
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	305.731.700	1 unit	304.545.760	100,00	99,61
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	62 unit	98.145.000	62 unit	97.596.230	100,00	99,44
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	85 %	1.836.496.583		1.831.300.118		99,72
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	1.144.474.479	2 dokumen	1.141.760.577	100,00	99,76

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	185.365.898	2 Dokumen	184.078.891	100,00	99,31
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	32.731.900	1 dokumen Berita Acara	32.679.600	100,00	99,84
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	187.596.960	1 dokumen Berita Acara	187.206.600	100,00	99,79
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	738.779.721	2 dokumen	737.795.486	100,00	99,87
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	369.723.099	1 Dokumen	368.328.168	100,00	99,62
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	189.940.197	1 Dokumen	189.497.958	100,00	99,77

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan hasil pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	1 dokumen	105.631.000	1 Dokumen	105.171.000	100,00	99,56
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	74.151.902	1 dokumen	73.659.210	100,00	99,34
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85 %	322.299.005	85 %	321.211.373	100,00	99,66
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	94.279.905	2 Dokumen	93.913.273	100,00	99,61
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	3 dokumen	136.437.000	3 dokumen	135.809.150	100,00	99,54

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	91.582.100	40 dokumen	91.488.950	100,00	99,90
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	100 %	4.049.235.444		3.999.295.647		98,77
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	1.400.092.017	2 Dokumen	1.384.048.003	100,00	98,85
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	298.558.950	2 Dokumen	295.961.685	100,00	99,13

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	65.636.000	3 rumusan	65.427.000	100,00	99,68
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	72.927.700	1 Laporan	72.546.500	100,00	99,48
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	39.301.950	1 Laporan	38.853.730	100,00	98,86
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	318.509.500	2 Dokumen	314.916.691	100,00	98,87

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	122.356.800	3 rumusan	122.023.800	100,00	99,73
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	68.568.500	1 Laporan	67.380.500	100,00	98,27
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	414.232.617	1 Laporan	406.938.097	100,00	98,24
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	985.864.535	2 Dokumen	1.151.642.954	100,00	99,37

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	150.815.750	2 Dokumen	150.395.177	100,00	99,72
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	93.131.500	3 rumusan	93.131.500	100,00	100,00
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	77.779.750	1 Laporan	77.772.200	100,00	99,99
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	339.345.444	1 Laporan	337.527.803	100,00	99,46
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	145.011.200	2 Dokumen	143.616.542	100,00	99,04

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	69.603.200	3 rumusan	69.572.200	100,00	99,96
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	72.469.300	1 Laporan	72.208.300	100,00	99,64
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	210.731.500	1 Laporan	207.419.232	100,00	98,43
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	1.490.255.783	2 Dokumen	1.463.604.690	100,00	98,21
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	346.624.308	2 Dokumen	345.866.779	100,00	99,78

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	67.016.500	3 rumusan	66.640.750	100,00	99,44
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	28.485.000	1 Laporan	27.654.500	100,00	97,08
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	735.988.575	1 Laporan	712.049.747	100,00	96,75
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	197.691.800	2 Dokumen	197.425.805	100,00	99,87

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	21.471.200	3 rumusan	21.432.900	100,00	99,82
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 laporan	29.934.300	1 Laporan	29.716.400	100,00	99,27
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	63.044.100	1 Laporan	62.817.809	100,00	99,64

3.2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2022 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73	76,30
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25	76,69
3	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	83	93,66

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat diukur melalui 3 sasaran dengan masing-masing indikator tahun 2022 sebagaimana tergambar pada penjelasan berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang diukur melalui tiga dimensi, yaitu
 - a. Dimensi Proses
 - b. Dimensi Isi
 - c. Dimensi Tindak Lanjut

Semua dimensi pengukuran yang terdiri dari Dimensi Proses, Dimensi Isi dan Dimensi Tindak Lanjut telah dapat dinilai dengan hasil mencapai 76,30. Untuk lebih detailnya mengenai Indeks Kualitas Perencanaan dapat dilihat pada tabel 3.2.2. Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Sampai dengan Tahun 2022.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, indikator dari sasaran strategis ini adalah nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Sumatera Barat tahun 2021 berdasarkan evaluasi Inspektorat Nomor 17/INSP-LHE-SAKIP/III-2022 tanggal 14 Maret 2022 memperoleh nilai 76,69 dengan kategori BB.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga Desember 2022 mencapai 93,66 %.

**Tabel 3.2.2 Capaian Indeks Kualitas Perencanaan
Bappeda Provinsi Sumatera Barat
sampai dengan Tahun 2022**

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Hasil
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	2,93
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	1,67
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	3,87
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	0,50
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	2,00
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	2,00
		Musrenbang Provinsi	15,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	5,12
				Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	0,31
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi	3,00%	3,00
				Pelaksanaan Musrebang	3,00%	3,00
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	6,82
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	7,00
		Konsistensi	20,00%	Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD	10,00%	10,00
				konsistensi anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD	10,00%	0,10

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Hasil
		Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5,00%	5,00
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	3,85
				Persentase capaian IKD	7,00%	5,32
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	8,82
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD	5,00%	5,00
Jumlah	100,00%					76,30

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Serapan belanja APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp. 18.920.620.969,- atau 99,23 % terhadap pagu Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi fisik 100 %. Hasil ini telah sesuai dengan harapan, dimana seluruh indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang direncanakan.
2. Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran diturunkan kedalam tiga indikator kinerja. Sampai akhir desember 2022, capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Indikator Indeks Kualitas Perencanaan telah mencapai angka 76,30, angka ini diatas target yang ditetapkan sebesar 73.
 - b. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 17/INSP-LHE-SAKIP/III-2022 tanggal 14 Maret 2022 memperoleh nilai 76,69 dengan kategori BB. Nilai ini masih dibawah target sebesar 78,25.
 - c. Indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga desember 2022 mencapai 93,66 % dengan target 83.

4.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berikutnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan, antara lain:

1. Konsinsten melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat dalam DPA.
2. Dalam menyusun rencana kerja hendaknya selalu memperhatikan hasil reviu inspektorat dan BPK.
3. Untuk meningkatkan Indek Kualitas Perencanaan dapat dilakukan dengan mengoptimalisasikan publikasi tahapan perencanaan, meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dan melaksanakan musrenbang tematik.

Demikian Laporan Tahunan Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD TA 2022 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sekaligus sebagai referensi untuk kegiatan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.